

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Hukum Islam

Achmad Rizal Maulana*¹, Abdur Rahim², Munawir Sajali³
^{1,2,3} Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Indonesia

Alamat: Mekarjaya, Kec. Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45264
Korespondensi penulis : achmadrizalmaula@gmail.com*

Abstract: Indonesia has a land area of 1,919,440 km², comprising 17,508 islands, with a total territory of 5,193,250 km², including maritime and exclusive economic zones. This maritime potential supports the country's abundant natural resources. This study aims to examine the role of Ma'had Al-Zaytun in revitalizing Indonesia's maritime culture based on Law Number 32 of 2014 and Islamic Law. The research employs a normative juridical approach, using primary data sources such as Law Number 32 of 2014, the book *Fiqh al-Bi'ah* (Environmental Jurisprudence), and other related literature. The findings indicate that Ma'had Al-Zaytun plays a significant role in the vision of Indonesia's maritime culture. The institution integrates a maritime curriculum, including a program for Maritime Vocational Islamic High Schools, to enhance students' understanding of maritime heritage. Ma'had also established the Samudra Biru Port as a learning facility and a means to manage post-harvest marine products, supporting ecological practices based on *Fiqh al-Bi'ah*. This approach aligns with Islamic law, which promotes environmental preservation for communal welfare. The development of fishing vessels and marine product management reflects the institution's commitment to sustainable maritime resource stewardship. Thus, Ma'had Al-Zaytun serves as a model for integrating education and resource management in line with Islamic legal principles.

Keywords: Ma'had Al-Zaytun, Indonesian Maritime Culture, Islamic Law

Abstrak: Indonesia memiliki luas daratan 1.919.440 km², terdiri dari 17.508 pulau, dengan total wilayah 5.193.250 km² termasuk zona laut dan ekonomi eksklusif. Potensi kelautan ini mendukung kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Ma'had Al-Zaytun dalam membangun kembali budaya maritim Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, buku *Fiqh Lingkungan* (*Fiqh al-Bi'ah*), dan literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun berperan signifikan dalam visi budaya maritim Indonesia. Institusi ini mengintegrasikan kurikulum maritim, termasuk program Madrasah Aliyah Kejuruan Kelautan, untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kebudayaan maritim. Ma'had juga membangun Pelabuhan Samudra Biru sebagai sarana pembelajaran dan pengelolaan hasil laut pasca-panen, mendukung praktik ekologis berbasis *Fiqh Al-Bi'ah*. Pendekatan ini mengacu pada hukum Islam yang mendorong pelestarian lingkungan demi kemaslahatan bersama. Pembangunan kapal penangkap ikan dan pengelolaan hasil laut mencerminkan komitmen institusi terhadap kelestarian sumber daya maritim. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun menjadi model integrasi pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam sesuai prinsip hukum Islam.

Kata kunci: Ma'had Al-Zaytun, Budaya Maritim Indonesia, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pada pertemuan United Nations Group of Expert Geological Names tahun 2022, tercatat bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau. Selain memiliki banyak pulau, Indonesia juga merupakan negara terluas di Asia Tenggara dan memiliki garis pantai terpanjang. Sebagai negara kepulauan, wilayah laut Indonesia lebih besar dibandingkan daratannya. Ada tiga cara untuk menghitung luas wilayah suatu negara: luas daratan, luas perairan, dan total luas wilayah. Luas

daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² yang terdiri dari 17.508 pulau. Dari ujung ke ujung, Indonesia membentang sejauh 3.977 mil. Wilayah laut Indonesia memiliki batas 12 mil laut dan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Dari Sumber Belajar Kementerian Pendidikan Kemdikbud, disebutkan luas Indonesia seluruhnya 5.193.250 km². Dengan demikian Indonesia memiliki kekayaan dari hasil laut serta sumber daya alam yang melimpah (Mulyadi, 2016). Gambaran ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan yang luas, tetapi juga memiliki wilayah maritim yang sangat besar. Kombinasi antara daratan dan lautan yang luas ini memberikan Indonesia keunggulan dalam hal keanekaragaman hayati, sumber daya mineral, serta potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Besarnya wilayah ini juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ada empat fakta penting terkait sejarah dan budaya maritim Indonesia. Pertama “Fakta Geografis” Indonesia adalah negara maritim, dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan, sebuah fakta yang tak terbantahkan. Kedua “Fakta Historis” Kejayaan maritim Indonesia telah diakui sejak zaman Sriwijaya (abad ke-7 hingga ke-13) dan berlanjut hingga pertengahan abad ke-17. Namun, setelah periode ini, dunia maritim mengalami perubahan besar, terutama karena kolonialisme. Ketiga “Budaya Maritim” Walaupun secara geografis Indonesia adalah negara maritim, menurut pendapat Fernand Braudel, yang menghubungkan wilayahnya bukanlah laut, melainkan para pelaut. Laut berfungsi tidak hanya sebagai infrastruktur tetapi juga sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup masyarakat maritim. Keempat “Hukum Laut” Setelah merdeka, para pemimpin Indonesia merumuskan dan memperjuangkan konsep batas maritim melalui jalur hukum untuk menjaga kedaulatan maritimnya (Yunandar, 2004).

Kemaritiman sebagai salah satu aktifitas budaya secara lebih luas dapat dimaknai sebagai perwujudan dari wujud gagasan interaksi manusia dengan perairan dalam beragam bentuk, mulai dari kaitannya dengan memenuhi kebutuhan hidup, misalnya mencari ikan, sampai kaitannya dengan mata pencaharian seperti pelayaran dan perdagangan (Mulyadi, 2016). Kemaritiman, sebagai aspek penting dari kebudayaan, mencerminkan hubungan yang kompleks antara manusia dan lingkungan perairan. Konsep ini meliputi berbagai bentuk interaksi yang telah berkembang sepanjang sejarah peradaban manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, kemaritiman dapat dipahami sebagai manifestasi dari ide-ide dan praktik-praktik yang muncul dari hubungan manusia dengan air. Interaksi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari aktivitas-aktivitas dasar untuk bertahan hidup hingga kegiatan ekonomi yang lebih kompleks.

Di satu sisi, kemaritiman melibatkan upaya-upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini termasuk kegiatan seperti menangkap ikan, yang telah menjadi sumber pangan penting bagi banyak masyarakat pesisir sejak zaman kuno. Di sisi lain, kemaritiman juga mencakup aktivitas-aktivitas yang lebih berorientasi pada mata pencaharian dan pengembangan ekonomi. Ini meliputi pelayaran, yang memungkinkan eksplorasi dan konektivitas antar wilayah, serta perdagangan maritim, yang telah menjadi penggerak utama pertukaran budaya dan ekonomi global selama ribuan tahun. Dengan demikian, kemaritiman tidak hanya terbatas pada kegiatan di laut, tetapi juga mencakup berbagai bentuk interaksi manusia dengan sungai, danau, dan bentuk perairan lainnya. Ini menunjukkan bagaimana air telah memainkan peran sentral dalam membentuk budaya, ekonomi, dan cara hidup manusia di berbagai belahan dunia.

Dalam catatan sejarah Indonesia, hubungan dagang yang lebih dulu berkembang adalah antara India dan Indonesia, diikuti oleh hubungan dagang antara Cina dan Indonesia. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional laut antara dua negara adidaya pada masa itu, yaitu India dan Cina (Mulyadi, 2016). Posisi Indonesia yang berada di antara dua kekuatan ekonomi besar kala itu, India dan Cina, menjadikannya sebagai titik penting dalam jalur perdagangan internasional melalui laut. Lokasi kepulauan Indonesia yang berada di persimpangan rute pelayaran antara kedua negara adidaya tersebut memungkinkan terjadinya interaksi dagang yang intensif. Keuntungan geografis ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran barang, tetapi juga mendorong terjadinya pertukaran budaya dan pengetahuan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat pertemuan berbagai peradaban, yang pada gilirannya turut membentuk kekayaan budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Perkembangan hubungan dagang ini menunjukkan bahwa sejak zaman kuno, Indonesia telah memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan maritim internasional, yang menjadi cikal bakal posisinya yang strategis dalam ekonomi global hingga saat ini. Kerajaan besar maritime nusantara mampu menjelajah laut. Namun sayangnya colonial Eropa masuk dan melemahkan kekuatan maritime tersebut, sehingga bangsa Indonesia lupa akan jati diri bangsanya sebagai negara bahari (Novita et. al. 2020).

Negara kepulauan Indonesia dikaruniai dengan sumber daya alam yang berlimpah, tersebar di sepanjang garis pantainya yang panjang dan pulau-pulau kecilnya yang banyak. Wilayah-wilayah ini bukan hanya menyimpan potensi ekonomi yang signifikan, tetapi juga merupakan area yang vital dari segi ekologi. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia menawarkan peluang pembangunan ekonomi yang besar, namun pada saat yang sama juga merupakan ekosistem yang rentan dan memiliki peran penting dalam keseimbangan

lingkungan. Mengingat dualitas ini, menjadi sangat penting untuk menerapkan pendekatan pengelolaan yang tidak hanya efektif tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pengelolaan wilayah kelautan Indonesia tertuang pada Undang-undang nomor 32 tahun 2014. Dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Strategi pengelolaan yang tepat harus mampu menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan ekonomi dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati serta fungsi ekologis wilayah tersebut. Hal ini mencakup upaya konservasi, pemanfaatan yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kekayaan alam ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat dalam jangka panjang. Indonesia, dengan statusnya sebagai negara kepulauan, memiliki kekayaan alam yang melimpah yang tersebar di sepanjang garis pantai dan pulau-pulau kecilnya yang luas. Wilayah ini tidak hanya menawarkan potensi ekonomi yang besar, tetapi juga merupakan ekosistem yang kritis secara ekologis. Oleh karena itu, penerapan strategi pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ini menjadi sangat krusial.

Manajemen yang tepat akan memastikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya untuk kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan alam. Lebih dari itu, pengelolaan yang bijaksana juga akan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, menjaga kearifan lokal, serta mempertahankan harmoni sosial. Dengan demikian, pendekatan terpadu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial di Indonesia.

Berdasarkan hasil data FAO, perikanan Indonesia mencapai 6,43 Juta ton di tahun 2020 (Putri, 2023). Kenyataannya Indonesia masih mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang baik dan berkualitas (Rahim et. al., 2023). Hal ini dapat disebabkan Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan kekayaan lautnya. Banyak permasalahan terjadi dalam tata kelola laut yang ada di Indonesia, antara lain: 1) sektor kelautan yang dipegang oleh orang yang bukan berkompeten di bidangnya, 2) permasalahan kedaulatan kelautan Indonesia yang lemah (Fajar, 2021). Rendahnya pengelolaan kekayaan laut dapat menjadi kendala dalam pengelolaan potensi kelautan, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1) kendala

budaya; 2) meredupnya kejayaan Nusantara sebagai negara bahari yang disebabkan runtuhnya kerajaan Majapahit; 3) dalam tiga dasawarsa terakhir, sektor kelautan menjadi anak tiri dalam prioritas pembangunan ekonomi nasional; 4) kendala terkait kebijakan pembangunan nasional; 5) rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut; dan 6) belum adanya perhatian yang maksimal mengenai wawasan kemaritiman dari pemerintah sebagai wahana sosialisasi pembangunan kelautan (Fuad & Musa, 2017). Dalam hal ini untuk dapat mengelola potensi kelautan dengan maksimal, diperlukan sosialisasi untuk memotivasi dan menyadarkan masyarakat dalam mengembangkan bidang kemaritiman.

Kesadaran akan nilai budaya maritime masa lampau perlu dipupuk sejak dini terutama bagi kalangan pelajar guna pembangunan Indonesia sebagai negara bahari yang kuat dan Tangguh (Nurhayati et. al., 2023). Hal ini dikarenakan pelajar merupakan generasi penerus bangsa. Dalam meningkatkan minat dan pemahaman bidang kemaritiman dapat dilakukan dengan memasukkan pendidikan kebaharian dalam kurikulum pendidikan nasional pada semua level satuan pendidikan (Fuad & Musa, 2017). Pendidikan karakter kemaritiman sebagai upaya dini mengajarkan jiwa kemaritiman serta mengenalkan anak-anak agar mencintai laut sebagai bagian dari kehidupan (Asy'ari et. al., 2023). Hal ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan semangat dan jiwa bahari bangsa Indonesia.

Selain permasalahan kelautan yang disebutkan di atas, masalah utama kemaritiman yaitu degradasi kebudayaan maritime di Indonesia. Kebudayaan Indonesia saat ini berjalan jauh meninggalkan kebudayaan laut dan maritim. Kondisi Indonesia saat ini adalah minimnya pengetahuan mengenai laut daripada daratan, sehingga dominasi ekonomi saat ini yaitu daratan (Oktavian dan Yulianto, 2014). Di samping berbagai tantangan kelautan yang telah dibahas sebelumnya, Indonesia kini menghadapi masalah yang tidak kalah krusial, yaitu memudarnya budaya maritim. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam orientasi budaya bangsa.

Saat ini, terlihat jelas bahwa perkembangan kebudayaan Indonesia telah bergerak menjauh dari akar maritimnya. Meskipun secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan, paradoksnya, pemahaman masyarakat tentang laut dan kehidupan maritim cenderung terbatas. Kesenjangan pengetahuan ini mencerminkan perubahan fokus yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir. Keterbatasan wawasan maritim ini berdampak luas, tidak hanya pada aspek budaya tetapi juga pada orientasi ekonomi negara. Saat ini, aktivitas ekonomi Indonesia lebih condong ke arah daratan, mengabaikan potensi besar yang ditawarkan oleh sektor kelautan dan maritim. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Dominasi ekonomi berbasis daratan telah mengakibatkan kurangnya

perhatian dan investasi dalam pengembangan sektor maritim, padahal sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk menghidupkan kembali budaya maritim Indonesia. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan laut dan potensi maritim negara. Hal ini penting tidak hanya untuk melestarikan warisan budaya, tetapi juga untuk membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa bahari.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang kelautan, Ma'had Al-Zaytun berupaya membangun Kembali budaya maritime Indonesia. Ma'had Al-Zaytun merupakan Lembaga Pendidikan yang mandiri. Tidak hanya menjadi pusat Pendidikan, Ma'had Al-Zaytun juga membangun ekonomi baik dibidang pertanian dan kelautan. Program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Al-Zaytun yaitu program green ekonomi dan blue ekonomi.

Mahad Al-Zaytun merupakan pusat pendidikan modern yang mengaplikasikan sistem pendidikan terintegrasi satu pipa (one pipe system education) (Tabroni, 2018). Tujuan Pendidikan di Ma'had Al-Zaytun adalah “mempersiapkan siswa untuk berakidah kokoh terhadap Allah SWT dan syariat-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaqul karimah, berilmu pengetahuan yang luas, dan berketerampilan yang tinggi yang kesemuanya itu terkandung dalam kata basthotan fil ‘ilmi wal jismi sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan ukhrowi” (Prawoto et. al., 2024). Dalam hal ini, Ma'had Al-Zaytun mendidik siswa agar terampil dalam setiap bidang baik itu Pendidikan, ekonomi, budaya di Indonesia serta hukum Islam. Salah satu budaya yang dikembangkan Al-Zaytun saat ini yaitu budaya kemaritiman Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, tertarik melakukan penelitian terkait kemaritiman Indonesia. Dalam hal ini, salah satu instansi yang sedang menumbuhkan kembali budaya maritime Indonesia yaitu Ma'had Al Zaytun, melalui pembuatan galangan kapal dan pengadaan jurusan kemaritiman di Sekolah Menengah Kejuruan nya. Untuk itu, peneliti mengambil judul penelitian “Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Perspektif Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 dan Hukum Islam”. Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi wawasan umum dalam menumbuhkan kembali budaya maritime di Indonesia

2. KAJIAN TEORITIS

Berikut adalah definisi istilah yang merupakan penjelasan dari variabel yang terdapat dalam judul penelitian.

a. Peran

Peran adalah "suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang didasarkan pada status dan fungsi sosialnya." Peran membentuk sikap dan perilaku individu, yang dipengaruhi oleh status dan fungsinya. Dengan kata lain, status seseorang berperan dalam membentuk perilakunya (Diana et al., 2017).

b. Mahad Al-Zaytun

Ma'had Al-Zaytun adalah pondok pesantren modern sebagai pusat Pendidikan terbesar se-Asia Tenggara. Yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pendiriannya pada tahun 1992 dilakukan oleh Prof. Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, MP., yang lebih dikenal sebagai Syakh Zaytun. Ma'had Al-Zaytun terkenal dengan pendekatan pendidikan holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan (Herdi et. al., 2023).

c. Membangun Kembali

Membangun kembali dalam konteks pasca-konflik di Sierra Leone sebagai upaya untuk mengembalikan atau menciptakan kembali kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang stabil setelah kerusakan ekstrem atau kehancuran (Richards, 1996). Dalam hal ini, membangun Kembali berarti membentuk serta menciptakan kembali sesuatu yang pernah ada. Hal yang dibangun kembali pada dasarnya adalah suatu kondisi yang pernah maju namun seiring waktu semakin pudar. Upaya membangun kembali berarti menciptakan kembali kondisi seperti masa kejayaannya seperti dulu.

d. Budaya

Budaya mencakup semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia, yang meliputi seluruh tatanan cara hidup yang kompleks. Ini termasuk pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, serta berbagai kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya merupakan jati diri dan ciri khas suatu bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya. Budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respons individual pada lingkungannya. Dalam hal ini, budaya merupakan suatu kebiasaan yang dibuat secara bersama-sama oleh masyarakat di wilayah tertentu (Syakhrani & Kamil, 2022).

e. Maritim

Secara terminologi, kemaritiman berasal dari kata dasar "maritim." Maritim berarti (1)

segala sesuatu yang berkenaan dengan laut dan (2) berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Kata "maritim" berasal dari bahasa Latin "mare," yang berarti laut. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi "mere," meskipun pengertiannya sudah berbeda. Makna ensiklopedis dari "maritim" hanya ada dua: berlayar dan berdagang. Pengertian ini sejalan dengan arti kata "maritime" dalam kamus Merriam-Webster, yaitu "of or relating to navigation of the sea." Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "maritim," yang pengertiannya mengacu pada KBBI Online, yaitu "maritim/ma·ri·tim/ a berkenaan dengan laut" (KBBI, 2011).

f. Budaya Maritim

Budaya maritim merupakan dasar dalam pembentukan elemen-elemen pertahanan maritim di Indonesia. Pertahanan maritim yang kuat. Sangat ditentukan oleh adanya budaya maritim yang kuat. Semakin kuat budaya maritime maka jiwa keberanian masyarakatnya semakin kuat serta akan memiliki sikap rela berkorban demi mempertahankan wilayahnya (Wiranto 2020).

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014

Undang-undang adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum suatu negara, terutama dalam negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia. Proses pembuatannya melalui tahapan yang diatur dalam konstitusi, mulai dari pengajuan, pembahasan, hingga pengesahan (Saputra, 2016).

h. Hukum Islam

Istilah Syari'ah merujuk pada hukum yang berasal dari aturan-aturan yang diwahyukan oleh Allah SWT sebagai sumber hukum. Dengan demikian, Hukum Islam merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur kemaslahatan terkait tindakan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (Aprliyan, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian studi literasi. Studi literasi sebagai cara yang digunakan dari sumber referensi yang terkait dengan topik pembahasan (Nurfitriyanti et al., 2024). Pengumpulan data dalam penelitian studi pustaka dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dokumen, dan sumber data lain yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian (Supriyadi, 2016). Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari artikel, buku dan internet sejumlah 85 jurnal/prosiding dan buku terkait budaya maritim Indonesia,

undang-undang nomor 32 tahun 2014 serta hukum Islam. Selanjutnya dilakukan pembahasan terkait peran Ma'had Al-Zaytun dalam membangun kembali budaya maritim Indonesia perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2014 dan hukum Islam.

Data primer dalam penelitian ini diambil dari buku-buku karangan Buku ASI yang menjelaskan tentang Ma'had Al-Zaytun, selanjutnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, buku Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) K.H. Dr. Ahsin Sakho Muhammad, buku Panorama Maqashid Syariah karya Dr. Busyro, M.Ag dan Terjemah Tafsir Al Maraghi. Adapun data sekunder yang digunakan oleh peneliti melibatkan buku-buku, jurnal, tesis, skripsi, dokumen, peraturan, dan jenis penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini akan terdiri dari literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dokumen resmi, serta sumber-sumber online terkait Peran Ma'had Al-Zaytun dalam implementasi budaya maritim. Data sekunder ini akan menjadi basis analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengumpulkan, merangkum, dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul. Selanjutnya, data dianalisis, diperiksa, dijelaskan, dan dievaluasi lebih rinci dari berbagai faktor yang terkait dengan fenomena yang sedang diselidiki (Sudjana, 2007). Pemeriksaan dan evaluasi dapat dilakukan melalui artikel yang terkait upaya membangun kembali kemaritiman yang dilakukan Ma'had Al-Zaytun

4. PEMBAHASAN

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia

Pesantren adalah merupakan Lembaga Pendidikan yang memberlakukan system Pendidikan 24 jam di lokasi yang sama dengan tujuan mempermudah pengaplikasian Pendidikan secara total (Sugandi et. al., 2017). Pesantren saat ini berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dapat dikatakan bahwa pesantren merupakan *“the use of book only as the instructional media could not maximize the learning process. The appropriate media to use was multimedia as it was able to accommodate most of the materials on this subject”* (Manggo & Ismaniati, 2018). Selain mempelajari ilmu agama, pesantren saat ini turut berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sekitar. Seharusnya pondok pesantren secara aktif terlibat dalam pembangunan masyarakat dimana pondok pesantren itu berada (Sugandi et. al., 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 4 pesantren memiliki tiga tujuan utama, yakni pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan dakwah (Chairunissa, 2024). Dalam hal ini

pesantren tidak hanya mempelajari pelajaran agama saja, tetapi juga mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan warga sekitar dalam memberdayakan pengelolaan lingkungan sekitar. Pada bidang Pendidikan hendaknya pesantren mampu memberikan contoh dan kepada masyarakat serta melakukan dakwah terkait hukum Islam terhadap masyarakat.

Pesantren memiliki fungsi, yaitu: 1) *Islamic Values* yaitu mentransformasikan ilmu agama Islam dan nilai-nilai ke-Islaman; (2) *Social Control* yaitu menjadi lembaga bidang keagamaan yang selalu melaksanakan kontrol sosial; dan (3) *social engineering* yaitu melakukan perbaikan rekayasa dibidang social (Sugandi et. al., 2017). Dalam pelaksanaannya pesantren tidak sekedar mempelajari ilmu agama tetapi juga harus mempelajari ilmu lain agar mampu melaksanakan kehidupan social. Dalam hal ini, pesantren harus menjadi pendorong agar masyarakat sekitar dapat hidup mandiri.

Peran pesantren dalam memberdayakan ekonomi umat sangat strategis. Pada dasarnya, pesantren dapat menjadi pionir dalam memajukan perekonomian negara melalui keunikan serta sumber daya yang dimilikinya (Fathoni & Rohim, 2019). Pengelolaan yang optimal akan menjamin keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya untuk kemajuan ekonomi dan konservasi lingkungan. Tata pemerintahan yang baik dapat dianggap sebagai suatu ijtihad yang dilakukan untuk mencapai masalah, yaitu tujuan syari'at, baik dalam aspek politik maupun administratif, serta dalam menjalankan aktivitas usaha secara disiplin (Rahim et. al., 2023). Keseimbangan pemanfaatan sumber daya merupakan salah satu bentuk pencapaian masalah yang dilakukan secara syari'at.

Ma'had Al-Zaytun merupakan salah satu Lembaga Pendidikan terbesar di Indonesia yang memiliki kemandirian terutama dalam bidang ekonomi. Ma'had AL-Zaytun merupakan Lembaga Pendidikan yang ada di bawah naungna Yayasan Pesantren Indonesia. Sebagai suatu Lembaga yang besar, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan, namun juga bidang ekonomi dan kemaritiman. Dalam hal ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya memberikan Pendidikan layak untuk para pelajarnya, tetapi juga berupaya membangun dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dikawasan tersebut. Ma'had Al-Zaytun terkenal dengan pendekatan pendidikan holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan (Herdi et. al., 2023).

Dalam pelaksanaannya, Ma'had Al-Zaytun berdedikasi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam beragam program dan aktivitasnya. Tujuan dari pembekalan para peserta didik adalah untuk memberikan wawasan dan keahlian yang diperlukan agar mereka dapat berkontribusi di sektor ekonomi. Selain itu Ma'had Al-Zaytun mempersiapkan generasi berjiwa pemimpin yang memiliki Tindakan dan kebijakan terhadap rakyatnya berdasarkan

pada kemaslahatan atau kepentingan umum sesuai kaidah *fiqihyyah*:

عليهم ولا زومه الرعية على الراعي تصرفه فإذ إن أي بمصلحة، منوط الرعية على التصرف
تصرفه إن تصرفه، ضمن في والمدفعة المصلحة وجود على وموقف معلق أب أو شأوا
شيء في النظر من ولا يس التفع، والضرر بين مترددت صرفه فإن تصرفه،

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan, artinya Keberlakuan tindakan pemimpin terhadap rakyat dan kewajibannya atas mereka, baik mereka suka atau tidak, bergantung pada adanya kemaslahatan dan manfaat dalam tindakannya aka bertindak dengan pertimbangan atau berada di antara bahaya dan manfaat, maka itu bukarilah suatu pertimbangan” (Azzarqo, 1989, hlm.309).

Berdasarkan dengan hadis nabi;

الجنة رائحة يرحل لم به نصح يخطها لم " عملا الأمة هذه أمور من ولي من

"Barang siapa yang diberikan amanah dari urusan umat ini, tetapi tidak melaksanakan dengan baik, maka dia tidak akan mencium aroma surga" (Azzarqo, 1989, hlm.309).

Pesantren memiliki sumber daya dan modal yang cukup untuk dijadikan basis pemberdayaan ekonomi umat (Fathoni & Rohim, 2019). Dengan sumber daya dan modal tersebut, pesantren dapat melaksanakan berbagai aktivitas yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Ma'had AL-Zaytun merupakan salah satu pesantren yang menerapkan hal tersebut.

Dalam pemberdayaan ekonomi umat, pesantren Ma'had Al-Zaytun melakukan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi secara mandiri diantaranya *Green* Ekonomi di bidang perkebunan buah dan sayur, pertanian pangan pokok seperti beras, peternakan ayam, sapi, domba, kambing, kerbau, dan perikanan serta Koperasi Desa Kota (Prawoto & Anisa, 2023). Selain program ekonomi hijau, Ma'had Al-Zaytun dalam pemberdayaan ekonomi umat sekitar juga melaksanakan program *Blue* Ekonomi. *Blue economy* sebagai suatu konsep paradigma baru dalam pembangunan ekonomi dimana laut dijadikan sebagai sumber utama dalam pembangunannya (Ghalidza, 2020). Ma'had Al-Zaytun juga menerapkan konsep *Blue* ekonomi. Konsep *Blue* Ekonomi di Ma'had Al-Zaytun mengutamakan laut sebagai sumber utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sunarya & Khasanah, 2023). Perairan Indonesia memiliki sumber daya yang berlimpah, sehingga dapat dijadikan andalan dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Jumlah komoditas perikanan akan besar jika terealisasi dengan menggunakan inovasi dan teknologi yang tepat guna (Ghalidza, 2020). Dengan hal ini, produksi perikanan nasional akan bertambah sehingga kebutuhan pangan yang berasal dari sector perikanan dan perairan

Indonesia akan terpenuhi. Selain itu, Jika produktivitas perairan berhasil dioptimalkan, maka potensi aktivitas ekspor komoditas akan meningkat. Hal ini dapat menciptakan sumber devisa negara yang signifikan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Manajemen yang bijak akan meningkatkan kesejahteraan penduduk pesisir dan pulau-pulau kecil, memelihara kearifan lokal, dan menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, pendekatan menyeluruh dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi vital untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang mencakup aspek ekologis, ekonomis, dan sosial.

Program membangun Kembali budaya Maritim Indonesia ini diawali dari peran Ma'had Al-Zaytun dalam mensosialisasikan budaya maritime Indonesia hampir ke seluruh Kawasan di pulau Jawa. Pada tahun 2017 Ma'had Al-Zaytun melaksanakan event sepeda jelajah keliling jawa route Banyuwangi-Banten sejauh 2727 Km. Saat berada di daerah Rembang Syaikh Al-Zaytun berhenti dilokasi pembuatan kapal nelayan. Saat itu Syaikh Al-Zaytun berbincang dengan pengrajin pembuatan kapal, beliau bertanya mulai dari bahan yang dibutuhkan sampai berapa lama pengerjaan. Pada akhir perbincangan Syaikh mengundang pengrajin kapal nelayan datang ke Al-Zaytun agar dapat membuat kapal di Pondok pesantren. Dalam membangun Kembali budaya maritime Indonesia, Ma'had Al-Zaytun berkontribusi dalam beberapa program, diantaranya yaitu di bidang Pendidikan serta perekonomian kelautan.

Dalam bidang Pendidikan, Ma'had Al-Zaytun membuat jenjang sekolah setingkat Madrasah Aliyah yaitu Madrasah Aliyah Kejuruan. Jurusan yang ada di Madrasah Aliyah Kejuruan Ma'had Al-Zaytun Pertanian dan Kelautan. Tujuan dibuatnya Madrasah Aliyah Kejuruan yaitu agar siswa memiliki keahlian di bidang jurusan yang diambilnya. Dalam jurusan Kelautan, diharapkan santri Ma'had Al-Zaytun memiliki keahlian di bidang teknologi kelautan serta mampu melakukan program *Blue* ekonomi kedepannya dan mampu membangun kemaritima bangsa Indonesia. Pendidikan kelautan diperlukan guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dalam memahami kelautan (Nasution, 2022). Pemahaman ini diperlukan sebagai upaya melestarikan lingkungan di masa depan terutama pada ekosistem pesisir.

Perekonomian kelautan yang diprogramkan oleh Ma'had Al-Zaytun yaitu membangun darmaga Al-Zaytun atau yang disebut Pelabuhan Samudra Biru sebagai kawasan industri perikanan. Pelabuhan/darmaga Al-Zaytun ini dibuat untuk menangani ikan-ikan pasca panen. Diharapkan *blue economic* pesantren Al-Zaytun yang dibuat dengan lahan seluas 350 hektar dapat membawa pengaruh besar bagi perekonomian masyarakat terutama bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar Kawasan Pelabuhan (Sunarya & Khasanah, 2023). Langkah awal

dalam program ini yaitu dengan membuat beberapa kapal kayu besar yang digunakan untuk penangkapan ikan serta dapat dijadikan sebagai sarana dalam melakukan kerjasama antar pulau.



Gambar 1. Proses Pembuatan Kapal LKM K1

Gambar 1 merupakan proses pembuatan kapal LKM K1. Kapal tersebut terbuat dari kayu ulin dan diperkuat menggunakan marine plate pada bagian lunas dan pelapis dalam. Penggunaan kayu ulin dan marine plate adalah agar kapal menjadi lebih kuat dan tahan bocor. Kapal yang dibuat direncanakan sebanyak 5 kapal dengan fungsi dan ukuran berbeda.



Gambar 2. Kapal LKM K1

Gambar 2 merupakan kapal pertama yang dibuat dan disebut kapal LKM K1 memiliki ukuran Panjang 30 meter dan lebar 8 meter, selain itu kapal ketiga direncanakan akan dibuat dengan ukuran Panjang 105 meter dengan lebar 15 meter. Masing-masing kapal yang dibuat direncanakan memiliki fungsi yang berbeda, diantaranya kapal pertama dan kedua ditujukan untuk menangkap ikan dan kapal ketiga digunakan untuk membawa barang dan sebagai kapal penumpang (Sanjaya, 2023; MI Ma'had Al-Zaytun).

Selain pelaksanaan program *Blue Ekonomi*, Pelabuhan/darmaga Ma'had Al-Zaytun juga digunakan sebagai kegiatan pembelajaran lapangan yang diberikan kepada siswa. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada santri Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaytun dan santri Madrasah Tsanawiyah Alzaytun. Tujuan diadakannya pembelajaran lapangan yaitu:

1. Memperkenalkan kepada santri bahwa selain Lembaga Pendidikan, Ma'had Al-Zaytun juga mengelola bidang perekonomian baik *green* ekonomi maupun *blue* ekonomi.
2. Menumbuhkan kecintaan santri terhadap kelautan, hal ini dengan memperkenalkan bahwa sumber alam yang terbesar di Indonesia berasal dari laut.
3. Memperkenalkan kepada santri bahwa sumber daya dari laut tidak hanya ikan namun juga pertambangan seperti minyak, emas, besi dan lainnya.
4. Selain itu Syaykh Al-Zaytun juga menjelaskan bahwa membangun maritime bukan sekadar kepentingan ekonomi melainkan juga upaya menjaga kedulatan laut Indonesia. (MTs Al-Zaytun)



Gambar 3. Kunjungan Santri ke Pelabuhan Samudra Biru

Gambar 3 menunjukkan kunjungan santri Ma'had Al-Zaytun ke Pelabuhan Samudra Biru. Dalam hal ini santri diajak berkeliling Pelabuhan dan diperkenalkan mengenai tujuan adanya Pelabuhan tersebut. Pengenalan ini juga menunjukkan kepada santri selain bidang Pendidikan, Ma'had Al-Zaytun juga membangun bidang perekonomian melalui *Blue* ekonomi.



Gambar 4. Kayu Ulin sebagai Bahan dalam Pembuatan Kapal

Pada gambar 4 merupakan sosialisasi yang dilakukan kepada santri Ma'had Al-Zaytun. Pada gambar ini dijelaskan kepada santri bahwa pembuatan kapal menggunakan bahan kayu ulin. Melalui pengenalan ini, Ma'had Al-Zaytun menunjukkan kepada santri bahwa alam yang

ada di bumi dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Dan hal utama yang diajarkan dalam pengenalan ini yaitu agar manusia senantiasa menjaga keseimbangan lingkungan alam.



Gambar 5. Pengenalan Mengenai Kemaritiman pada Santri Al-Zaytun.

Pada gambar 5 dilakukan pengenalan budaya maritime yang dilakukan kepada santri Al-Zaytun. Dalam sosialisasi ini dijelaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kuat dengan kemaritiman serta kekayaan sumber daya laut. Untuk itu, Indonesia dapat menjadi kuat kembali apabila kita dapat mengelola laut. Melalui pengenalan ini juga dijelaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan hebat melalui kemaritiman sehingga sebagai penerus bangsa, santri diharapkan dapat mengenal nenek moyang serta kemaritiman bangsa Indonesia.

Dalam membangun kembali budaya maritim kepada santri-santrinya Ma'had Al-Zaytun menciptakan lagu Pelaut. Lagu ini diajarkan dan dinyanyikan oleh seluruh santri Ma'had Al-Zaytun. Hal ini agar seluruh santri Ma'had Al-Zaytun menyadari dan tertanam dalam dirinya bahwa bangsa nya adalah bangsa maritime yang kaya akan lautan. Berikut lirik lagu yang diciptakan Ma'had Al-Zaytun:

PELAUT

*Aku pelanjut nenek moyangku
Pecinta laut samudra biru
Kujaga pantai kujaga selat
Dari pengganggu kekayaannya
Perut samudra Indonesia
Tidak terhingga kekayaannya
Hayo dijaga mari diraksa
Agar sejahtera rakyat Indonesia*

Selain melalui Pendidikan dan Pelabuhan Samudra biru, Ma'had AL-Zaytun juga aktif dalam penelitian dan inovasi yang berfokus pada sektor maritim. Hal ini dilakukan melalui

kerja sama dengan berbagai lembaga penelitian dan universitas, baik dalam maupun luar negeri. Dengan adanya kegiatan ini memungkinkan lembaga ini untuk mengembangkan teknologi dan metode baru dalam pengelolaan sumber daya laut. Penelitian yang dilakukan Ma'had Al-Zaytun mencakup studi tentang keberlanjutan perikanan, konservasi terumbu karang, dan mitigasi perubahan iklim yang berdampak pada ekosistem laut. Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan berkelanjutan bagi tantangan-tantangan maritim yang dihadapi oleh Indonesia (Prawoto & Anisa, 2023).

Ma'had Al-Zaytun telah mengembangkan fasilitas pendidikan yang lengkap untuk mendukung pembelajaran di bidang maritim. Fasilitas ini mencakup: Laboratorium maritim, simulator navigasi, peralatan perikanan modern, Fasilitas ini memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh dan praktis, mempersiapkan siswa untuk langsung bekerja di industri maritim setelah lulus. Lembaga ini juga rutin mengadakan seminar dan lokakarya dengan mengundang pakar maritim, praktisi, dan pembuat kebijakan. Kegiatan ini bertujuan untuk, Membahas isu-isu terkini di sektor maritim, berbagi pengetahuan, mencari solusi bersama untuk tantangan yang ada, memberi kesempatan networking bagi siswa dan alumni. Ma'had Al-Zaytun telah memasukkan materi maritim ke dalam kurikulum mereka. Hal ini memastikan setiap siswa memahami pentingnya sektor maritim bagi Indonesia dan diharapkan dapat menginspirasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan maritim di masa depan. Dengan pendekatan ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran dan dedikasi tinggi terhadap pengelolaan sumber daya maritim (Sumadinata, 2022).

Dalam pelaksanaannya, Ma'had Al-Zaytun sangat berperan dalam membangun Kembali budaya maritime Indonesia. Hal ini terlihat dari program yang dilaksanakan di Ma'had Al-Zaytun, baik program dalam bidang Pendidikan maupun program dalam bidang ekonomi. Kesuksesan Ma'had Al-Zaytun dalam membangun Kembali budaya maritime dapat dilihat dari kesadaran dan pemahaman santri mengenai maritime dan kelautan; membangun Madrasah Aliyah Kejuruan bidang kelautan; serta pembuatan pelabuhan Samudra biru serta kapal LKM K1.

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam membangun kembali budaya maritim Indonesia perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2014

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan laut yang berlimpah. Wilayah Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau. Posisi geografis Indonesia sangat strategis, terletak di antara dua benua besar - Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudera utama - Hindia dan Pasifik (Prasetya, 2017). Letak yang unik ini tidak hanya memberikan Indonesia

akses ke berbagai jalur pelayaran internasional, tetapi juga menempatkannya sebagai titik pertemuan berbagai budaya dan perdagangan. Posisi ini juga menjadikan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati laut dan memiliki potensi ekonomi maritim yang besar.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menempatkan laut sebagai media penyatu, lautan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjadi urat nadi perekonomian bagi kebanyakan masyarakat yang hidup di sepanjang garis pantai. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dikaruniai sumber daya kelautan yang melimpah, tetapi juga memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan dari segi geopolitik, ekonomi, dan ekologi maritim. Komunitas nelayan dan penduduk wilayah pesisir, yang mengandalkan hasil laut sebagai sumber penghidupan, menaruh harapan besar pada implementasi kebijakan ekonomi yang berpusat pada sektor maritim. Visi maritim merupakan kebutuhan bagi bangsa Indonesia, oleh karenanya diperlukan pola pikir dan sikap yang dilandasi oleh kesadaran maritim (Brotosusilo et. al, 2016).

TNI memandang poros maritime dunia sebagai penegasan pentingnya geopolitik dan geoekonomi bangsa dengan bentuk geografis negara kepulauan, oleh karena itu Indonesia mempunyai potensi dalam politik dan perdagangan dunia (Ghufron et. al, 2018). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi dalam perdagangan dunia. Hal ini dibuktikan saat masa kejayaan majapahit yang menunjukkan bahwa Indonesia pernah berjaya pada perdagangan dunia.

Pudjiastuti menyatakan bahwa

“Maritime security is not only concerned with law enforcement at sea, but maritime security in the broadest sense is also that the sea is an area that is safe for use by users and free from threats or disturbances to various marine use and utilization activities, namely 1) A sea that is free from the threat of violence; 2) Seas that are free from threats to navigation; 3) Sea that is free from pollution and destruction of ecosystems; 4) A sea that is free from the threat of lawlessness” (Pudjiastuti et. al., 2021).

Dalam hal ini acaman kemaritiman tidak hanya dari negara lain, namun pemanfaatan laut yang merusak ekosistem juga termasuk salah satu bentuk ancaman. Untuk itu diperlukan undang-undang yang mengatur terkait kwlautan baik dari segi wilayah maupun pengelolaannya. Hal ini sebagai landasan hukum yang harus ditaati seluruh masyarakat dalam mengelola laut.

Salah satu undang-undang yang membahas tentang kelautan adalah undang-undang

nomor 32 tahun 2014. Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2014 pasal 5 ayat 1 bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis dengan batas wilayah ditarik dari garis pangkal kepulauan. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 pasal 6 ayat 3 juga dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan kelautan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014).

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi maritim yang luar biasa. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dan budaya maritim yang pernah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia mulai memudar. Dalam upaya membangun kembali budaya maritim, berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting. Meskipun tidak secara khusus berfokus pada bidang maritim, lembaga ini memiliki peran untuk berkontribusi dalam membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui pendidikan dan ekonomi.

Melalui pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi, Ma'had Al-Zaytun dapat menjadi katalisator dalam menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan potensi maritim Indonesia secara berkelanjutan. Kolaborasi antara Ma'had Al-Zaytun dan pemerintah terlihat nyata dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang diarahkan untuk masyarakat pesisir. Pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang mendukung yang dilaksanakan Ma'had Al-Zaytun. Sinergi ini telah berhasil menciptakan program-program yang memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka (Siswoputro, 2023).

Dalam pelaksanaan membangun Kembali budaya maritime Indonesia, Ma'had AL-Zaytun melalui Pendidikan memberikan kesadaran kepada santri bahwa negara Indonesia kaya akan lautan. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, santri Ma'had Al-Zaytun menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya serta lagu Nenek Moyangku. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menumbuhkan kecintaan nasionalisme serta menyadarkan bahwa Indonesia merupakan negara maritime. Pelaksanaan program ini disesuaikan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2014 pasal 3e.

Pengembangan budaya maritime yang ditanamkan melalui Pendidikan juga dengan membentuk Madrasah Aliyah Kejuruan di bidang Kelautan. Dengan adanya madrasah ini diharapkan santri yang bersekolah MAK jurusan kelautan ini memiliki keahlian yang mumpuni dalam bidang kelautan. Sehingga kedepannya santri lulusan MAK jurusan kelautan ini dapat

mengelola laut dan menjadikan pembangunan maritime kelautan sebagai salah satu bagian pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional yang tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 pasal 13 ayat 1. Selain itu lulusan MAK jurusan kelautan mampu menjadi sumber daya manusia yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu, sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2014 pasal 3f.

Selain bidang Pendidikan, peran Ma'had Al-Zaytun dalam membangun Kembali budaya maritime Indonesia yaitu melalui bidang ekonomi. Tiga hal yang harus dipersiapkan menuju ekonomi biru adalah 1)kapal, 2)pelabuhan, dan 3)Sumber Daya Manusia. Hal pertama yang dilakukan Ma'had Al-Zaytun dalam melaksanakan program ekonomi biru dengan membuat pelabuhan Samudra biru (Sunarya & Khasanah, 2023). Pelabuhan samudra biru dibuat untuk menangani produksi-produksi ikan pasca panen sebagai bentuk Kawasan Industri Perikanan (Sunarya & Khasanah, 2023). Selanjutnya Ma'had AL-Zaytun membuat kapal kayu yang bertujuan untuk menangkap ikan dan kapal penumpang. Kapal kayu yang pertama dibuat dinamakan kapal LKM K1 dengan ukuran Panjang 30 meter dan lebar 8 meter. Pembuatan pelabuhan dan kapal kayu ini sebagai bentuk pemanfaatan dan pengelolaan laut dengan menjaga kelestarian ekologi laut Indonesia. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut serta *blue* ekonomi sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2014 BAB IV tentang pengelolaan kelautan. Langkah selanjutnya dalam menciptakan *blue* ekonomi yaitu mempersiapkan sumber daya manusia. Dalam hal ini Ma'had Al-Zaytun bekerjasama dengan warga sekitar Kawasan Pelabuhan Samudra biru. Selain itu melalui program MAK jurusan kelautan, Ma'had Al-Zaytun membentuk generasi yang ahli dan terampil dalam bidang kelautan.

Dalam perannya membangun Kembali budaya maritime, Ma'had Al-Zaytun melaksanakan program Pendidikan dan proram *blue* ekonomi. Program-program yang dilaksanakan ini sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2014. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam membangun Kembali budaya maritime Indonesia sesuai dengan perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2014 baik dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kemaritiman Indonesia maupun pengelolaan kelautan.

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam membangun kembali budaya maritim Indonesia Berdasarkan Hukum Islam

Indonesia memiliki kekayaan dari hasil laut serta sumber daya alam yang melimpah. Ma'had Al-Zaytun melakukan pengelolaan kekayaan hasil laut dengan didasari potensi

pendidikan dan nilai-nilai Hukum Islam. Kekayaan hasil laut merupakan salah satu bentuk harta. Menurut konsep Maqasid al-Asasiyah Ibnu Taimiyah bahwa harta merupakan kebutuhan pokok manusia yang digunakan untuk menjalankan kehidupan di muka bumi. Pada dasarnya menjaga dan melestarikan harta termasuk dalam salah satu tujuan *maqashid Syariah* dalam kategori *Hifzu al-mal*. Selain itu, pengelolaan harta juga perlu menggunakan konsep *Hifzu al-Aql*. Hal ini agar dalam pengelolaan kekayaan laut dilakukan dengan semestinya tanpa ada kecurangan (Sutisna et al., 2021)

Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam mendukung pembangunan maritim yang berkelanjutan dan kemaslahatan umum, mencerminkan komitmen pada identitas maritim dan kedaulatan bangsa. Ma'had Al-Zaytun mengimplementasikan program pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Institusi ini memprioritaskan kurikulum yang bertujuan mendalami dan menghayati ajaran-ajaran fundamental Islam. Dalam program *Blue* ekonomi yang dilaksanakan, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berperan dalam menghidupkan kembali budaya maritim Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sektor kelautan secara holistik. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam, institusi ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, namun juga mempertimbangkan aspek keadilan, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan manusia dan pelestarian alam dalam setiap kebijakan publik. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang membagi tujuan *hifzul al-mal* dalam tiga bagian, yaitu:

1. Ketetapan syariat Islam diantaranya yaitu mengenai kegiatan transaksi muamalah yang diperbolehkan jika tidak ada dalil yang melarang transaksi tersebut
2. Penegakkan keadilan diantaranya aktivitas ekonomi yang menjadi tujuan hakiki pada syariat Maliyah. Upaya syariah *hifzu al-mal* dilakukan untuk mencegah tindakan zalim terhadap hak-hak manusia
3. Penegakan syariat terhadap keharusan pemberlakuan hukum had bagi pencuri dan perompok/begal. Hukuman jinayah diberlakukan kepada orang yang mengambil harta manusia secara tidak sah. Hukum jinayah merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan harta (*hifzu al-mal*) (Sutisna et al., 2021)

Dengan demikian Ma'had Al-Zaytun mempersiapkan generasi yang berbudi pekerti baik sehingga menjadi insan yang mulia. Santri Ma'had AL-Zaytun diharapkan dapat memberikan contoh yang baik di daratan serta memberikan pembelajaran terkait kemaritiman sehingga memiliki peran dalam budaya maritim. Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Ma'had

Al-Zaytun adalah melalui pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas. Institusi ini mengadakan kursus-kursus singkat dan lokakarya yang fokus pada keterampilan praktis seperti teknik budidaya ikan, pengolahan hasil laut, dan manajemen sumber daya laut. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, Ma'had Al-Zaytun membantu masyarakat pesisir untuk meningkatkan produktivitas mereka dan menciptakan nilai tambah bagi hasil laut yang mereka peroleh.

Pendidikan juga perlu mencakup aspek-aspek lingkungan, seperti praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan konservasi ekosistem laut, untuk memastikan bahwa sumber daya laut dapat terus dimanfaatkan dalam jangka panjang (Cahyadi, 2021). Ma'had Al-Zaytun tidak hanya fokus pada pendidikan dan pelatihan, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemajuan teknologi di wilayah pesisir. Lembaga ini menjalin kemitraan strategis dengan institusi riset dan sektor industri untuk memperkenalkan inovasi teknologi kepada masyarakat nelayan. Salah satu inisiatif utama adalah pengenalan alat tangkap ikan yang lebih canggih dan berwawasan lingkungan.

Teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut. Hasilnya, nelayan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Pendekatan ini mencerminkan visi Ma'had Al-Zaytun dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi alam. Dengan memadukan pengetahuan tradisional nelayan dengan teknologi modern, lembaga ini berupaya menciptakan model pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Inovasi-inovasi semacam ini tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga mendukung upaya pelestarian sumber daya laut jangka panjang. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Melalui program ini, Ma'had Al-Zaytun membuktikan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat pesisir, meningkatkan taraf hidup mereka, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan wilayah pesisir lainnya di Indonesia.

Ma'had Al-Zaytun juga mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi. Salah satu program unggulan adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perikanan dan kelautan. Melalui dukungan finansial, pelatihan manajemen bisnis, dan akses ke pasar, Ma'had Al-Zaytun membantu masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan keluarga. Program ini juga mencakup pembentukan koperasi nelayan yang dapat memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir dalam rantai pasok perikanan, sehingga mereka dapat memperoleh harga yang lebih adil

untuk hasil tangkapan mereka (Towadi, 2021).

Dalam hal ini beberapa asas yang perlu diperhatikan terkait kelautan dalam perspektif Islam berdasarkan Al Quran, yaitu:

a. Asas Perhatian terhadap laut

Dijelaskan pada Q.S. At-Thur ayat 6 yang berbunyi:

وَالْمَسْجُورِ وَالْبَحْرِ

Artinya: 'Dan demi laut yang di dalam tanahnya ada apinya'.

Dalam hal ini sumpah Allah SWT ini menunjukkan perhatian terhadap laut. Dalam ayat ini, Allah SWT mengingatkan kita untuk menjaga kelestarian alam. Sebagai manusia diingatkan agar jangan merusak sistem alam yang menyebabkan kehancuran alam sehingga lenyap nikmat yang Allah SWT berikan (Al-Maraghi, 1993). Hal inilah yang menjadi dasar bahwa umat manusia harus memanfaatkan sumber daya laut serta menjaga keseimbangan laut yang telah dianugerahkan Allah SWT. Bangsa Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

b. Asas Kepemilikan Allah

Al-Quran, Surah Al-Jatsiyah ayat 12:

تَشْكُرُونَ وَلِعَلَّكُمْ فَضْلِهِ مِنْ وَلَيْتَبْتَغُوا بِأَمْرِهِ فِيهِ الْفُلُكُ لِنَجْرِ الْبَحْرِ لَكُمْ سَخَّرَ الَّذِي اللَّهُ

"Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur."

Asas ini menegaskan bahwa laut adalah milik Allah SWT dan diperuntukkan bagi manusia untuk dimanfaatkan. Ayat ini menjadi landasan bahwa karunia yang Allah SWT berikan luas diantaranya yaitu lautan. Dalam lautan terdapat sumber daya alam yang dapat dikelola oleh manusia sehingga kita sebagai manusia perlu menyyukurinya. Berdasarkan Ayat ini dinyatakan bahwa Allah SWT telah memudahkan penghidupan manusia dalam mencari rezeki Allah SWT dalam laut. Allah SWT memudahkan kita menggunakan laut yang dapat dilayari oleh kapal agar kita dapat mengelola sumber daya laut, sehingga kita dapat bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan (Al-Maraghi, 1993)

c. Asas Pemanfaatan yang Adil

Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 14:

مَنْ تَبْتَغُوا فِيهِ مَوَازِرَ الْفُلُكِ وَتَرَى تَلْبَسُونَهَا جِلْيَةً مُمِدَّ وَتَسْتَخْرِجُوا طَرِيًّا لَحْمًا مِنْهُ لِتَأْكُلُوا الْبَحْرَ سَخَّرَ الَّذِي وَهُوَ تَشْكُرُونَ وَلِعَلَّكُمْ فَضْلِهِ

"Dan Dia-lah, Allah SWT yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur."

Asas ini mengajarkan bahwa Allah SWT menciptakan ikan segar untuk dikonsumsi oleh manusia agar manusia menjadi sehat dan terlindungi oleh zat-zat berbahaya (Al-Maraghi, 1993). Melalui ayat ini, Allah SWT menunjukkan kecintaannya pada manusia agar senantiasa menjaga kesehatan dengan memanfaatkan hasil laut. Selain itu, ayat ini dijelaskan bahwa lautan memiliki sumber daya alam yang banyak yang dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi. Sumber daya alam yang didapat dapat dijadikan sebagai bahan pangan maupun untuk perdagangan.

d. Asas Pelestarian Lingkungan

Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 56:

الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ إِنَّ ۖ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ لِصَلْحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسُدُوا وَلَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah SWT amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

Meskipun ayat ini tidak secara khusus menyebut laut, prinsip pelestarian lingkungan berlaku untuk semua ciptaan Allah, termasuk laut. Allah SWT membuat kemaslahatan dengan menciptakan bumi dan isinya untuk dieksplorasi oleh manusia. Namun pada dasarnya pengelolaan tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada serta memikirkan program berkelanjutan kedepannya.

e. Asas Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 109:

مَدَدًا بِمِثْلِهِ جِنًّا وَلَوْ رَّبِّي كَلِمَةٌ تَنْفَدَ أَنْ قَبْلَ الْبَحْرِ لَنَفَدَ رَبِّي لِكَلِمَةٍ مَدَادًا الْبَحْرُ كَانَ لَوْ قُلْ

"Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)."

Ayat ini mendorong manusia untuk terus menggali ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kelautan. Ayat ini menjelaskan bahwa ilmu dan hikmah Allah SWT tidak pernah habis (Al-Maraghi, 1993). Manusia merupakan makhluk yang sempurna yang diciptakan Allah. Allah SWT menciptakan manusia dengan akal yang dapat digunakan untuk berpikir.

Dengan proses belajar manusia mendapat ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu dalam pemanfaatan teknologi dan pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya lautan.

f. Asas Keselamatan di Laut

Al-Quran, Surah Yunus ayat 22:

عَاصِفٌ رِّيحٌ جَاءَتْهَا بِهَا وَفَرَحُوا طَيْبَةً بِرِيحٍ بِهِمْ وَجَرَيْنَ الْفُلْكَ فِي كُنْتُمْ إِذَا حَتَّى وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي يُسَيِّرُكُمْ الَّذِي هُوَ
مَنْ لَنَكُونَنَّ هَذِهِ مِنْ أَنْجَيْنَا لِيْن هَ الْدِينِ لَهُ مُخْلِصِينَ اللَّهُ دَعُوا بِهِمْ أَحْيَطُ أَنَّهُمْ وَظَنُّوا مَكَانٍ كُلِّ مِنَ الْمَوْجِ وَجَاءَهُمْ
الشُّكْرِينَ

"Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya..."

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa watak manusia adalah kembali kepada Allah SWT apabila mendapatkan kesusahan (Al-Maraghi, 1993). Oleh karena itu, sebagai manusia hendanya selalu mengingat Allah SWT dalam kondisi apapun dan dimanapun. Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya keselamatan dalam pelayaran dan aktivitas kelautan. Allah SWT menciptakan bumi dalam bentuk darat dan lautan dimana keduanya memiliki sumber daya yang berlimpah. Dalam pengelolaannya hendaknya manusia menjadi bijaksana sehingga kondisi alam tetap lestari dan terjaga sehingga tidak akan ada kerusakan alam serta bencana alam yang disebabkan oleh kelalaian manusia.

g. Asas Kerjasama Internasional

Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13:

حَبِيرٌ لِيْمَاءِ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِنَعَارِفُوا وَقَبَائِلِ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَايَهَا
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal..."

Allah Swt menurunkan ayat ini untuk mencegah manusia dalam menghina orang fakir serta membanggakan nasabnya. Karena keutamaan manusia terletak pada takwanya. Selain itu Allah SWT menjadikan manusia bersuku-suku agar saling mengenal (Al-Maraghi, 1993). Dalam hal ini hendaknya sebagai manusia tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain, baik dalam satu bangsa atau dengan bangsa lainnya. Kontribusi Ma'had Al-Zaytun dalam perannya membangun kembali budaya maritim Indonesia sejalan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2014 dan hukum islam. Dengan mengedepankan keamanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan membangun Pelabuhan Samudra Biru di Pemkad Indramayu serta dapat memenuhi kebutuhan hajat perikanan di Indonesia

khususnya di Ma'had Al-Zaytun. Salah satu tujuan buatnya kapal besar adalah selain mengelola sumber alam laut, juga sebagai sarana Kerjasama antar pulau.

Dalam hal ini, Ma'had Al-Zaytun berupaya membangun Kembali budaya maritime Indonesia berdasarkan hukum Islam. Dalam pengembangan budaya tersebut, Ma'had Al-Zaytun membuat pelabuhan samudra biru sebagai Kawasan dalam pengelolaan ikan pasca panen. Hal ini dilakukan agar sumber daya alam yang diperoleh dan di kelola dapat memenuhi ketiga azas pengelolaan menurut hukum Islam. Segala objek perekonomian termasuk pengelolaan sumber daya alam dalam ekonomi Islam disederhanakan menjadi tiga prinsip fundamental yaitu:

1. Tauhid

Tauhid yang dimaksud adalah dapat digunakan untuk kemaslahatan Bersama bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Pengelolaan sumber alam laut dilakukan secara kerjasama bersama masyarakat sekitar Pelabuhan

2. *Khalifah*

Dalam pengelolaan sumber daya alam perlu dipimpin agar pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan Bersama. Dalam pengelolaan sumber alam laut perlu adanya pemimpin yang mengarahkan agar pelaksanaan dapat terkontrol sesuai dengan aturan perundang-undangan.

3. Keadilan

Pembagaaian hasil panen laut dibagi secara adil. Hal ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai lingkungan dalam Islam, tetapi juga mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik yang berorientasi pada keseimbangan ekologi dan kesejahteraan sosial (Sunarya & Khasanah, 2023).

Makna tauhid, khalifah dan keadilan ini sejalan dengan pemikiran Maqashid Syariah Imam Al-Juwaini yang ditulis (Sutisna et al., 2021). Salah satu hal yang dibahas oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini terkait penegakan nilai keadilan guna mencapai tauhid dan didukung oleh pemimpin yang memiliki kebijakan. Dalam hal ini penegakkan nilai keadilan diatur untuk kepentingan agama dan dunia melalui prinsip keadilan. Dengan adanya hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang baik dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta mampu melindungi warga negara dari perilaku kesewenangan termasuk kemakmuran ekonomi (Sutisna et al., 2021).

Selain itu kapal yang dibuat juga menggunakan kayu ulin. Hal ini membuktikan bahwa Ma'had Al-Zaytun memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan pengelolaan dengan baik. Salah satu sumber daya alam yaitu kayu ulin. Kayu yang digunakan Ma'had Al-Zaytun sebagai

material kapal menjadi faktor yang dapat mempengaruhi umur teknis kapal perikanan. Dalam hal ini dalam pembuatan kapal, Ma'had Al-Zaytun memanfaatkan kayu ulin dan diperkuat oleh marine plate agar kapal menjadi kuat dan tahan lama (Purba dalam Kurniawati et. al., 2011).

Pembangun Kembali budaya maritime Indonesia yang dilaksanakan Ma'had Al-Zaytun sesuai dengan hukum Islam dengan konsep *Fiqh Al Bi'ah*. Dalam mencapai kelestarian lingkungan dan kemaslahatan terdapat aturan mengenai perilaku ekologis masyarakat yang mengacu pada teks syar'i yang disebut dengan *Fiqh Al Bi'ah* (Noor, 2018). Hal ini terlihat dari pembuatan Pelabuhan Samudra biru yang bertujuan untuk pengelolaan hasil laut pasca panen serta pembuatan kapal penangkapan ikan. Hal ini membuktikan bahwa Ma'had Al-Zaytun menjaga pelestarian lingkungan dan mengelola sumber alam laut demi kemaslahatan bersama.

Selain itu, dalam membangun Kembali budaya maritime Indonesia, Ma'had Al-Zaytun membangun Pendidikan kejuruan kelautan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi bangsa yang terampil dan professional dalam memahami kemaritiman serta mampu mengelola kelautan agar tumbuh menjadi perekonomian nasional. Pemaknaan Islam diartikan bahwa Islam merupakan agama yang menekankan nilai-nilai profesionalitas dalam pekerjaan (Nurjamillah et. al., 2023). Hal ini membuktikan bahwa program profesionalisme atas program yang dilaksanakan Ma'had Al-Zaytun.

5. KESIMPULAN

Mahad Al-Zaytun berperan penting dalam membangun Kembali budaya maritime Indonesia. Program yang dilakukan dalam membangun Kembali budaya maritim Indonesia yaitu melalui bidang Pendidikan dan bidang ekonomi. Dalam membangun Kembali budaya maritime Indonesia melalui bidang ekonomi, Ma'had Al-Zaytun mengembangkan blue ekonomi. Pelaksanaan blue ekonomi tidak hanya untuk sector ekonomi, melainkan juga sebagai sarana membangun kembali budaya maritime di Indonesia. Program blue ekonomi yang dilaksanakan Ma'had Al-Zaytun sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2014 Bab IV mengenai pengelolaan kelautan. Melalui Pendidikan, program yang dilaksanakan oleh Ma'had Al-Zaytun dalam membangun Kembali budaya maritime Indonesia sesuai dengan perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Melalui Pendidikan, Ma'had Al-Zaytun mengenalkan serta menyadarkan kecintaan akan kelautan kepada santri-santrinya hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2014 pasal 3e. Membangun Madrasah Aliyah Kejuruan jurusan kelautan juga sebagai upaya membentuk profesionalisme dan keahlian santri dalam bidang kelautan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2014 pasal 3f. selain membentuk profesionalisme, lulusan Madrasah Aliyah Kejuruan jurusan kelautan ini

diharapkan mampu membangun perekonomian nasional melalui kelautan seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 pasal 13 ayat 1.

Program yang dilaksanakan oleh Ma'had Al-Zaytun dalam membangun Kembali budaya maritime Indonesia sesuai dengan perspektif juga sesuai dengan perpektif hukum Islam. Konsep hukum Islam yang diterapkan adalah konsep konsep Fiqh Al Bi'ah yang mengatur mengenai kelestarian dan kemaslahatan dalam perilaku ekologis dan pengelolaan sumber alam laut. Pengelolaan sumber alam laut ini juga sesuai dengan asas hukum Islam dimana pengelolaan harus bersifat tauhid, khalifah dan adil. Hal ini sesuai dengan program blue ekonomi yang dilaksanakan Ma'had Al-Zaytun. Selain itu, penciptaan generasi yang ahli, terampil dan profesional dalam bidang kelautan melalui Madrasah Aliyah Kejuruan sesuai dengan pemaknaan Islam dimana Islam menekankan nilai-nilai profesionallitas dalam pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Terjemahan. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Asy'ari., Nurafni., Wahab, I., Koroy, K., Nur, R. M., Alwi, D., Sofiati, T., Muhammad, S. H., Tjiroso, B. (2023). Pendidikan Kemaritiman Bagi Anak Sekolah Dasar Muhammadiyah 5 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai. *Journal of Khairun Community Services*, Vol. 3 (1), 33-38.
- Brotosusilo, A., Apriana, I. W. A., Satria, A. A., & Jokopitoyo, T. (2016). *Littoral and Coastal Management in Supporting Maritime Security for Realizing Indonesia as World Maritime Axis. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 30, 1-6.
- Diana, P., Suwena, I. K., & Wijaya, N. M. S. (2017). Peran dan Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas dan Desa Peliatan, Ubud. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(2), 84–92.
- Fuad. M. A., & Musa, M. (2017). Pengenalan Bidang Kemaritiman Sejak Usia Dini Melalui Pembelajaran Tematik Kelautan pada Siswa Taman Kanak-kanak. *JURNAL PENDIDIKAN GEOGRAFI: Kajian, Teori, dan Praktek dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi*, Vol. 22 (2), 93-104.
- Fathoni, M.A., & Rohim, A. N. (2019). Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. *Confrence of Islamic Manajemen Accounting and Economics*, Vol (2), 133-140.
- Fajar, J. (2021). *Iskindo: Amburadul Pengelolaan Laut Indonesia*. <https://www.mongabay.co.id/2021/10/07/iskindo-amburadul-pengelolaan-laut-indonesia/amp/>
- Ghufron, M. M., Herdiansyah, A. G., & Nuraeni. (2018). Air Power Development Strategy to

- Maintain Indonesian National Security as the World Maritime Axis. *CEJISS*, diakses dari [http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/\(the "License"\)](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/(the%20%22License%22)).
- Ghalidza, N.M. B. (2020). Konsep *Blue Economy* Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 22 (1), 27-31.
- Herdi, Hartono, Pardi, A., & Setiabudi, D. I. (2023). Peran Pesantren Al-Zaytun Dalam Proses Modernisasi Dan Kejayaan Islam Di Indonesia. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* ISSN: 2961-7693(2023),2(1), 59-64.
- Kurniawati, V. R., Novita, Y., & Kusumawati, I. (2011). Tingkat Pemanfaatan Material Kayu Pada Pembuatan Gaging-gading di Galangan Kapal Rakyat UD. Semangat Untung, Desa Tanah Beru, Bulukumba, Sulawesi Selatan. *Buletin PSP*, Vol 29 (3), 219-228.
- Muhammad.A. S., (2006). Fiqih Lingkungan *Fiqh al-Bi'ah*. **Conservation International Indonesia**.
- Mulyadi, Y. (2016). Kemaritiman, Jalur Rempah dan Warisan Budaya Bahari Nusantara. *Jurnal Universitas HASanuddin*, hal.1-11.
- Manggo, T. S. & Ismaniati, C. (2018). *Selecting Appropriate Instructional Media for Teaching Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Subject to Students of Junior High School*. *IOP Conf. Series: Journal of Physic*. doi:10.1088/1742-6596/1140/1/012040.
- MTS Ma'had Al-Zaytun. (2022). *Pesantren Membuat Kapal Laut*, diakses dari <https://mts.al-zaytun.sch.id/2022/07/santri-kelas-ix-mtsmahad-al-zaytun-yang.html>.
- MI Ma'had Al-Zaytun. (2022). *Kunjungan siswa MI ke pembangunan Dermaga Samudera Biru*, diakses dari <https://mi.al-zaytun.sch.id/2022/08/kunjungan-siswa-mi-ke-pembangunan.html>.
- Noor, F. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah. *JIPPK*, Vol. 3(1), 47-55.
- Novita, A., Adhityatama, S., Ramadhan, A. S., Manur, Y. H. M. (2020). Maritime Archeology Resources Potential in Belitung Waters. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 584, 1-10.
- Nasution, M. (2022). Potensi dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Budget* Vol. 7(2), 340-363.
- Nurjamillah, I., Rohmah, S. N., & Sajali, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Fiqih Siyasah. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 10(4), 1191-1208.
- Nurhayati, E. S., Widodo., Said, B. D., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2023). Membangun Paradigma Maritim Melalui Pembelajaran Sejarah Kemaritiman Untuk Mendukung Paradigma Pembangunan Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 11(2), 155-161.
- Nurfitriyanti, M., Candra, E. N., & Suharyati, H. (2024). Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan

- Peran Sekolah dalam Mencegah Bullying di Sekolah ditinjau dari Filsafat Etika. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3), 2041–2048. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6539>
- Oktavian, A., & Yulianto, B. A. (2014). Degradasi Kebudayaan Maritim: Sejarah, Identitas, dan Praktik Sosial Melaut di Banten. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 40 (2), 159-176.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Prasetya, M. N. (2017). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) dan Civil Society. *Jurnal PIR*, 1(2), 176–187.
- Prawoto, I., Rohmah, S. N., & Sunarya, F. R. (2020). Peran Preventif Pemimpin Dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19; Strategi Syaykh Al-Zaytun di Ma'had Al-Zaytun dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 (5), 403-422.
- Pudjiastuti, E. T., Putra, I. N., & Susilo, A. K. (2021). Vision of The World Maritime Axis of Indonesia as A Maritime Country In Alfred Thayer Mahan's Perspective, diakses dari [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0\(the "License"\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0(the%20License)).
- Prawoto, I., & Anisa, F. (2023). Peran Pondok Pesantren Al-Zaytun Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Volume 7, Nomor 1, Juli , 123-135.
- Putri, A. M. H. (2023). *Ironi Negara Maritim: Produksi Ikan Melimpah, Konsumsi Rendah*. CNBC Indonesia, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230113082338-128-405171/ironi-negara-maritim-produksi-ikan-melimpah-konsumsi-rendah>.
- Prawoto, I., Nopasari, D., & Mutia, N. A. (2024). Analisis Pembelajaran Abad 21 dalam Landasan Pesantren Spirit but Modern System di Ma'had Al-Zaytun, Indramayu. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, Vol. 1(1), 231-246.
- Richards, Paul. *Fighting for the Rain Forest: War, Youth & Resources in Sierra Leone*. Manchester University Press, 1996.
- Rahim, A., Alamsyah., A. S., Hasanudin., Abidin, I., & Mamat. (2023). The Role of Local Government In Implementing Good Governance Islamic Perspective. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 4(3), 2379-2385.
- Rahim, A., Ma'muri., Darussalam, R., Ramadhanti, Y., Tohari. (2023). The Role of Local Government in Overcoming Bad Nutrition In Indramayu District. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 4(3), 2361-2367.
- Supriyadi. (2016). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. *Lentera Pustaka* 2 (2):, 83-93.
- Saputra, A. (2016). Pengertian Undang-undang. *Varia Hukum*, Vol. 27, 346-349.
- Sugandi, A., Tanjung, H. B., & Rusli, R. K. (2017). Peran Pondok Pesantren (PONPES)

- Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tadbir Muwahhid*, Vol 1 (2), 99-115
- Sutisna., Hasanah, N., Dewi, A.P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi., Suparyono., Arsyad, K., & Triyawan, A. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Sumadinata, W. S. (2022). Membangun Kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia: Telaah Kritis Fungsi Keamanan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. *Ijd: International Jurnal Demos*.
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Cross-Border*, 5(1), 782–791.
- Sanjaya, Y. (2023). *WOW! Ukuran Kapal Al Zaytun Sebesar Bahtera Nabi Nuh, Panjang 158 Meter, Tinggi 3 Lantai, Muat 500 Orang*. Indramayu: Radar Cirebon, diakses dari <https://radarcirebon.disway.id/read/155698/wow-ukuran-kapal-al-zaytun-sebesar-bahtera-nabi-nuh-panjang-158-meter-tinggi-3-lantai-muat-500-orang>.
- Siswoputro, S. P. (2023). The World's Maritime Axis, A Critical Analysis. *Formosa Journal of Science and Technology*.
- Sunarya, F. R., & Khasanah, N. L. K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Pesantren Ma'had Al - Zaytun dan Resesi Ekonomi Global 2023. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 6(1), 1-11.
- Taimiyah, I. (2007). *Syarbu Kitab al-Siyasati al-Syariyah*. Kairo: Muassanah alMukhtar.
- Tabroni, R. (2018). Sistem Pendidikan Satu Pipa Ma'had Al-Zaytun Indramayu. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 13(2), 351-368.
- Wiranto, S. (2020). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(2), 110–126.
- Yunandar. (2004). Budaya Bahari DAM Tradisi Nelayan di Indonesia. *Sabda*, 22–35.